

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis .

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup yang layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.² Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya harus dilakukan secara terpadu guna mencapai hasil yang optimal.³ Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, peran serta Pemerintah dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.⁴

1 Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Jakarta; Erlangga, hlm.3

2 *Ibid.*, hlm. 2

3 Hendrojono Soewono, 2007, *Pertanggungjawaban Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Jakarta; Srikandi, hlm.3

4 Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta; Thafamedia, hlm.11

Penyelenggaraan kesehatan di Indonesia berdasarkan pada lima norma dasar kesepakatan Internasional yang menjadi kegiatan PBB,WHO, WMA. Kelima norma tersebut adalah *social defence*, *social security*, *social welfare*, *social policy* yang bersendi *human right* sebagai asas universal. Dengan demikian, sumber hukum kesehatan adalah "*lex specialis*" bukan kodifikasi hukum pidana atau perdata, bukan pula hukum perlindungan konsumen.⁵ Hukum kesehatan sebagai "*lex specialis*" melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju kearah tujuan deklarasi "*Health for All*" dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Kesehatan sebagai isu hukum serius dapat terlihat pada tahun 1960, dimana Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.⁶ Munculnya UU tentang Pokok-Pokok Kesehatan Tahun 1960, belum begitu tergali dengan baik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, masyarakat sudah mulai mempunyai acuan dan pedoman walaupun belum sempurna sampai dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

5 Nusye Ki Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, hlm.14

6 Siska Elvandari, *Op.Cit*, hlm. 10

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.⁷ Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat .

Rumah Sakit merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum atau korporasi yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana serta manusia sebagai tenaga medik.⁸ Menurut sistem hukum Belanda yang dianut oleh sistem hukum Indonesia sampai saat ini, subjek hukum itu terbagi 2 (dua) bentuk, yaitu manusia (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum sebagai suatu subjek hukum memiliki hak dan kewajiban tersendiri walaupun bukan manusia (*persoon*). Agar dapat bertindak dalam hukum maka badan hukum diwakili oleh orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

Istilah korporasi saat ini semakin berkembang, bahkan telah dicantumkan dalam beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

⁷ Tjandra Yoga Adhitma, 2010, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Jakarta; UI Press, hlm.11

⁸ Aron B.F Siahaan, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm.22

contohnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 138 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a menggantikan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995, yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseron melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris, melakukan tindakan melawan hukum , yang merugikan perseroan atau pemegang saham , atau pihak ketiga
- (2) Pemerisaan dilakukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum.

Badan hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap kesalahan (*schuld*) baik itu disengaja (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*). Maka dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebuah korporasi dapat dipidana, yaitu:

1. Dalam hal memberikan keuntungan, tidak adil bagi masyarakat jika korporasi tidak ikut bertanggungjawab atas perbuatan pegawainya.
2. Bahwa tidak cukup hanya dibebankan pada pengurus atas tindak pidana yang dilakukannya, karena pengurus tidak memiliki harta kekayaan yang banyak.
3. Mempertanggungjawabkan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan tindakan korporasi, akan mencegah korporasi lain melakukan hal yang serupa.

Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bukan hanya melibatkan tenaga kesehatan profesional tetapi juga tenaga kesehatan lainnya bahkan juga tenaga non kesehatan, akibatnya dapat terjadi benturan kepentingan dalam pelayanan kesehatan, sehingga perlu adanya penataan hubungan dalam pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Penataan hubungan tersebut yaitu hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit, hubungan antara dokter dan pasien dan hubungan dokter dengan tenaga kesehatan/non kesehatan lainnya.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, rumah sakit harus mengutamakan pelayanan keselamatan pasien (*patient safety*) yaitu proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk didalamnya asesmen resiko, identifikasi, manajemen resiko terhadap pasien, pelaporan dan analisa insiden dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya resiko, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa dan menetapkan dampak pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.

Pelayanan dalam rumah sakit adalah pelayanan yang sangat bertumpu pada pelayanan dokter, sebab posisi ini merupakan peran yang penting dalam fungsi memberi pelayanan kepada pelanggan rumah sakit. Bahwa sesungguhnya pasien datang ke rumah sakit karena ingin dilayani oleh dokter sesuai dengan keluhan yang diderita. Posisi dokter adalah posisi yang sangat penting dan sangat rawan karena berhadapan langsung dengan pelanggan serta persepsi baik buruknya sebuah rumah sakit ada di tangan dokter.⁹

Dalam melakukan profesinya, dokter dituntut harus mematuhi kode etik kedokteran yaitu ilmu kedokteran mutakhir, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama. Ilmu kedokteran yang menyangkut segala pengetahuan dan keterampilan yang telah diajarkan dan dimiliki harus dipelihara dan dipupuk, serta diamalkan sesuai dengan kemampuan dokter tersebut.¹⁰ Cara bekerja dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara “kemungkinan” dan “ketidak pastian” karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada setiap pasien: usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi, dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil yang bisa diberikan oleh dokter.¹¹ Oleh karena sifat “kemungkinan” dan

⁹ Nusye ki jayanti, *Op.Cit*, hlm.18

¹⁰ Gunawan , 1992, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta; Kanisus, hlm.20

¹¹ J.Guwandi, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika*, Jakarta; Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm.3

“ketidakpastian” dari pengobatan itulah maka dokter yang kurang berhati-hati dan tidak kompeten dibidangnya bisa menjadi berbahaya bagi pasien.

Interaksi yang terjadi antara pasien dan rumah sakit akan menimbulkan hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien. Hubungan hukum yang terjadi antara rumah sakit dan pasien tergantung dari hubungan antara dokter dengan rumah sakit. Hubungan hukum dokter dan rumah sakit adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Dokter sebagai subjek hukum orang pribadi dan rumah sakit sebagai subjek hukum yang berbadan hukum/ korporasi. Hubungan yang terbentuk adalah hubungan perdata, dimana timbul hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik.¹² Seiring dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, juga menyinggung hak dan kewajiban yang tidak saja menyangkut rumah sakit saja, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban pasien dan dokter.

Pada tahun 2004 muncul Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar antisipasi bahwa saat ini adanya anggapan banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan menghasilkan tenaga yang belum siap dipakai atau diduga akan melakukan “kesalahan medis” atau lebih dikenal “malpraktik”, isu perlindungan terhadap pelayanan kepada pasien dengan membatasi praktik dokter hanya di tiga

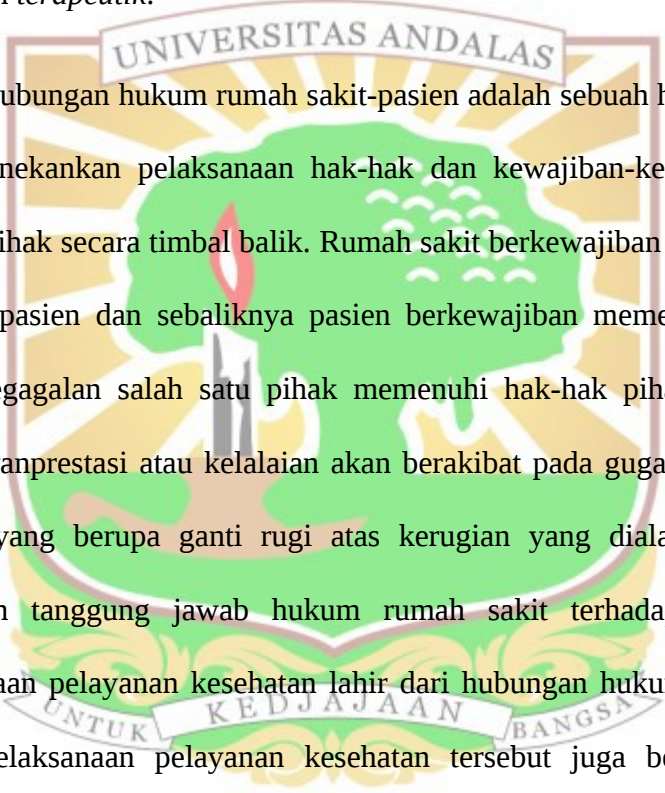
12 Wila Chandra Supriadi, 2002, *Hukum Kedokteran* , Bandung;CV.Mandar Manju, hlm.9

tempat saja. Disamping itu UU Praktik kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 juga memuat “muatan” perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Dalam hal hubungan kerja antara rumah sakit dan dokter, dalam hal dokter melakukan kesalahan atau kelalaian, maka rumah sakit dimintakan pertanggung jawabannya. Demikian juga dalam hubungan perjanjian, dalam hal dokter melakukan kesalahan atau kelalaian, maka rumah sakit juga dimintakan tanggungjawabnya. Dalam hal kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dokter, pihak rumah sakit harus turut serta bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan insiden keselamatan pasien yang merugikan pasien. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam Pasal 32 q Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga ditegaskan bahwa setiap pasien mempunyai hak menggugat/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.

Dasar hukum pertanggung jawaban rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien yaitu adanya hubungan hukum antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan yang disebut dengan perjanjian *terapeutik*.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak rumah sakit. Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, baik itu karena wanprestasi atau kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien. Meskipun tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana.

Implikasi terhadap hukum pidana dari hubungan hukum rumah sakit – pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan

pidana. Perbuatan pidana rumah sakit terhadap pasien dapat berupa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan damage pada tubuh korban, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu perbuatan pidana dan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan izin operasional rumah sakit.

Rumah sakit bertanggung jawab secara pidana terhadap insiden keselamatan pasien yaitu kesalahan medis (*medical error*), kejadian tidak diharapkan (*adverse event*) dan nyaris cedera (*near miss*) akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan berakibat cacat bagi pasien bahkan jiwanya tidak tertolong dan kesalahannya terbukti serta memenuhi unsur karena kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter pada saat melakukan tindakan medis di Rumah Sakit hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Oleh sebab itu dokter harus menyadari bahwa pekerjaan dan profesional selalu berhubungan dengan nyawa manusia.

13

Sorotan terhadap hubungan antara Rumah Sakit, Dokter, dan Pasien semakin dipicu dengan mencuatnya berbagai kasus-kasus medis yang terjadi belakangan ini. Di Indonesia awal tonggak timbulnya perhatian mendalam terhadap hukum kesehatan adalah dengan adanya kasus di Wedariyaksa, Pati,

13 Aron B.F Siahaan, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm.13

Jawa Tengah pada tahun 1981. Pada kasus yang terjadi di Pati, seorang wanita bernama Rukimini Kartono meninggal setelah ditangani Setianingrum, seorang dokter puskesmas. Pengadilan Negeri Pati memvonis dokter Setianingrum bersalah melanggar Pasal 360 KUHP. Dia dihukum tiga bulan penjara, setelah menyatakan banding ke tingkat pengadilan tinggi, putusan Pengadilan Negeri Pati ini diperkuat oleh putusan pengadilan tinggi. Akan tetapi ia selamat dari sanksi pidana setelah putusan Pengadilan Negeri Pati ini dikasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juni 1984.¹⁴ Kasus Pati ini sangat menyita perhatian masyarakat pada waktu itu dan menginspirasi cabang ilmu hukum kesehatan timbul di Indonesia.

Berdasarkan hal itulah perlu dibahas mengenai kesalahan medis kedokteran dari sudut pandang hukum pidana. Persoalan kesalahan medis kedokteran lebih dititik beratkan pada permasalahan hukum yang ditimbulkan, karena kesalahan medis kedokteran menyebabkan kerugian bagi pasien dan tidak jarang berakibat fatal. Oleh karena itu maka dokter pun dapat memiliki pertanggungjawaban pidana apabila telah terjadi tindak pidana yaitu peristiwa tersebut mengandung salah satu dari tiga unsur: (1) perilaku atau sikap tindak yang melanggar norma hukum pidana tertulis; (2) perilaku tersebut melanggar hukum; (3) perilaku tersebut didasarkan pada kesalahan.

¹⁴Nurlis E. Meuko, et al., "Malpraktik: Dokter Penghantar Maut," http://en.vivanews.com/news/read/34856-tabib_pengantar_maut,

Terjadinya suatu kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban profesional, berawal dari adanya ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan dokter, karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi, atau adanya suatu kesenjangan yang terjadi antara harapan pasien dengan kenyataan yang didapatkan oleh pasien.¹⁵

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang merupakan warisan dari Belanda, dan Indonesia telah menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Walaupun Indonesia sudah menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, namun sampai saat ini masih sedikit korporasi yang dijadikan tersangka ataupun terdakwa dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang ada di Indonesia.¹⁶

Semakin berkembangnya hukum di Indonesia, maka semakin dituntut agar korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum. Dalam perundang-undangan Indonesia sudah mengakomodir korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum dijadikan subjek hukum, yang mana juga mendukung hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh manusia.¹⁷

¹⁵ Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung; Citra Aditya, hlm. 238

¹⁶ H.Santhos Wachjoe P, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2, hlm.163

¹⁷ *Ibid.*, hlm.165

Dengan diadopsinya korporasi dalam undang-undang sebagai sebuah subjek hukum maka segala bentuk perilaku dan perbuatan korporasi dipersamakan dengan manusia. Sehingga apabila korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan negara ataupun pihak lain maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu segala bentuk pidana terhadap manusia dapat diterapkan terhadap korporasi.¹⁸ Walaupun pidana terhadap manusia dapat diterapkan terhadap korporasi akan tetapi pidana berupa pemenjaraan tidak dapat diterapkan terhadap korporasi.

Belum adanya parameter yang tegas terhadap pertanggungjawaban yang jelas dari Rumah sakit atas pelanggaran yang dilakukan dokter pada pasiennya tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan adanya hukum yang bisa benar-benar diterapkan dalam pemecahan masalah medik. Hukum ini sendiri baru akan bisa diperoleh jika fenomena yang terjadi di bidang kedokteran berhasil dipahami. Demikian juga dengan adanya kerancuan pemahaman atas masalah pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kesalahan medis yang masih sering dianggap sebagai pelanggaran dokter yang harus ada penyelesaian pidananya, padahal dalam kasus ini rumah sakit juga memiliki tanggung jawab secara pidana terhadap kesalahan yang dilakukan dokternya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.167

Berangkat dari deskripsi permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI TERHADAP KESALAHAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi terkait kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter?.
2. Bagaimanakah bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap rumah sakit sebagai korporasi terkait dengan kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi terkait kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter.

2. Untuk mengetahui bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap rumah sakit sebagai korporasi terkait dengan kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah referensi bagi kepentingan penelitian akademis mengenai hukum kesehatan dan konsep pengawasannya serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi profesional medis dengan gelar dokter (dr.), spesialis (Sp.),

bidan (Amd. Keb) atau berbagai gelar lainnya, serta masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait permasalahan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kegunaan kerangka teoritis salah satunya adalah untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan faktayang hendak diteliti atau diujikebenarannya.¹⁹

1. Kerangka Teoritis

a. Teori pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan serta subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²¹

Unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab berkenaan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dengan buruk, sesuai

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia(UI-Press),hlm.121

²⁰ Mahrus Ali,2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm:156

²¹ *Ibid.*,hlm.98

dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal), kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan (faktor kehendak).

2) Faktor kesalahan yang terdiri dari *dolus* atau kesengajaan dan *culpa* atau kealpaan.

3) Tidak adanya alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar yaitu menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, dan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum terdapat dua pendapat, pertama apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melawan hukumnya undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum adalah melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian ini dinamakan pendirian formal, yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa belum tentu semua perbuatan yang mencocoki

undang-undang adalah bersifat melawan hukum. Bagi mereka dinamakan bahwa hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (sebagai hukum tertulis), ada pula hukum tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian ini dinamakan pendirian yang material.²²

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam perumusan KUHP tentang ketidak mampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 jalan, yaitu :²³

- 1) Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan, menurut sistem ini jika *psychiater* telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila atau tidak sehat pikirannya maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana.

22 Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 141

23 Moeljatno, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 166

2) Menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan, yang terpenting adalah bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai) hakimlah yang menentukan.

3) Gabungan dari 1 dan 2 yaitu menyebutkan sebab0sebab penyakit dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya, sehingga tidak mampu bertanggungjawab pembuatnya.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Doktrin Vicarious Liability*. Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata.²⁴ Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).²⁵

²⁴ Loebby Luqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, hlm.84

²⁵ Sutan Remy S, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Gratifikasi, hlm.94

Dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, dimana pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya untuk bertanggungjawab. Akan tetapi pertanggungjawabannya tersebut terbatas sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.²⁶

Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang kemudian diadopsi kedalam hukum pidana sebagai doktrin *vicarious liability* yang mendasari salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).²⁷ Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm.93

perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.

Adanya hubungan yang bersifat subordinasi antara pemberi kerja dengan pekerja atau *principle* dengan *agent* menjadi syarat utama dalam *vicarious liability*. Hubungan tersebut yang kemudian menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Hal ini dikarenakan adanya pengatribusian perbuatan dari pemberi kerja kepada pekerja.

Dalam doktrin *vicarious liability*, atribusi perbuatan dari pemberi kerja kepada pekerja dapat dibagi menjadi dua tingkatan, adanya atribusi perbuatan ini rupanya dapat menimbulkan suatu keragu-raguan tersendiri. Hal ini dikarenakan luasnya otonomi yang dimiliki seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, sehingga pembebanan pertanggungjawaban kepada pemberi kerja, dalam hal ini korporasi, atas perbuatan pekerja, agen, atau wakil berdasarkan pekerjaannya dengan dasar hubungan subordinasi menjadi kabur seberapa jauh batasannya.

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang

berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas *mens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana, para ahli pada umumnya berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak yang bebas.²⁸

b. Rumah Sakit

²⁸ Roeslan Shaleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Balai Aksara, hlm.33.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dijelaskan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

c. Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

d. Kesalahan Medis

Menurut *Institute Of Medicine* , *medical error* didefinisikan sebagai suatu kegagalan tindakan medis yang telah direncanakan untuk diselesaikan tidak seperti yang diharapkan (kesalahan tindakan) atau perencanaan yang salah untuk suatu tujuan (kesalahan perencanaan). *Changing the system to reward the right thing*, memberikan definisi mengenai *medical error* sebagai suatu kekeliruan, suatu peristiwa yang tidak diduga terjadinya atau tidak dikehendaki dalam pemberian pelayanan medis yang dapat

mengakibatkan , atau tidak sampai mengakibatkan luka pada pasien.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur muthlak yang harus ada di dalam suatu penelitian, guna keberhasilan dari penelitian itu sendiri. Penelitian secara ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis suatu atau beberapa masalah yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Menurut Soerjono Sukanto, metodologi merupakan suatu unsur yang muthlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.³⁰

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

²⁹ J. Guwandi, 2005, *Medical Error dan Hukum Medis*, Jakarta; Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm.13.

³⁰ Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia PRESS, hlm. 7

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.³² Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan pustaka hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa norma dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada.³³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek

Kedokteran pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang

31 Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24

32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 37

33 *Ibid.*, hlm.30

uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/PID.SUS/2010,

4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

6) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.³⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang membahas tentang hukum pidana kesalahan medis.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah berbagai kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris serta sumber lain dari Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁴ *Ibid.*, hlm.31

³⁵ *Ibid.*

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari sumber-sumber tertulis yang ada. Cara yang dapat digunakan dalam melakukan studi dokumen terkait dengan penelitian ini adalah dengan menganalisa dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis maksud dari dokumen tersebut.³⁶

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari

³⁶ *Ibid.*, hlm.30

penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

